

# Prinsip Perlindungan yang Sama dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berat

*Fandy Prabowo - Rusdianto Sesung*

*prabowo.fandy@yahoo.com*

*Universitas Narotama*

*Jl. Arief Rachman Hakim*

*Surabaya, Indonesia*

**Abstract:** The legal assistance provided to the suspect or the defendant is essentially a defense of the law and the protection provided to the suspect or the defendant to be protected by rights. Often, abandonment and abuses in practice when a suspect is arrested and interrogated, an investigator rarely informs him of the right to legal aid. Whereas this provision has been regulated in Article 114 of the Criminal Procedure Code. This paper concludes with three conclusions. First, the constitution guarantees the right of every citizen to the equitable recognition, guarantee, protection and legal certainty and equal treatment before the law, including the right to access justice through the provision of legal assistance. Second, Some forms of legal guarantees against the perpetrators of serious criminal offenses who are provided with legal assistance, among others, accompanied by legal counsel provided by the state through legal aid providers that have been registered with the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia. Third, there have been many judicial decisions which have had permanent legal force and become jurisprudence which contains the unauthorized report of the hearing if the suspect's rights are not submitted / met by the investigator, especially the rights related to legal aid.

**Abstrak:** Bantuan hukum yang diberikan pada tersangka atau terdakwa pada hakekatnya merupakan pembelaan peraturan hukum dan perlindungan yang diberikan agar tersangka atau terdakwa terlindungi haknya. Namun sering terjadi pengabaian dan pelanggaran dalam praktek ketika tersangka ditangkap dan diinterogasi, berupa penyidik jarang sekali memberitahukan kepadanya hak mendapat bantuan hukum. Padahal ketentuan ini telah diatur dalam Pasal 114 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tulisan ini ditutup dengan tiga kesimpulan.

Pertama, konstitusi menjamin hak setiap warga negara mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum, termasuk hak untuk mengakses keadilan melalui pemberian bantuan hukum. Kedua, Beberapa bentuk jaminan hukum terhadap pelaku tindak pidana berat yang memperoleh bantuan hukum antara lain dengan didampingi oleh penasihat hukum yang disediakan oleh negara melalui lembaga-lembaga penyedia bantuan hukum yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Ketiga, telah terdapat banyak kasus yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menjadi yurisprudensi yang memuat tentang tidak sahnya berita acara pemeriksaan apabila hak tersangka tidak disampaikan/dipenuhi oleh penyidik. khususnya hak terkait dengan bantuan hukum.

**Kata Kunci:** perlindungan yang sama, bantuan hukum, dan penasehat hukum

## **Pendahuluan**

Negara Indonesia adalah negara hukum. sebagaimana amanat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka supremasi hukum harus ditegakkan. Hukum harus menjadi panglima dalam menjalankan pemerintahan demi tercapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam konsep Negara Hukum, Negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Negara juga bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan.<sup>1</sup>

Hak Konstitusional setiap warga negara Indonesia dalam hal ini telah diamanatkan dalam Pasal 28 huruf D,

---

<sup>1</sup> Lihat Konsideran penjelasan atas Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” Persamaan perlakuan di hadapan hukum bagi setiap orang berlaku dengan tidak membedakan latar belakangnya (ras, agama, keturunan, etnis, keyakinan politik, strata sosio-ekonomi, warna kulit dan gender). untuk memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan, persamaan di hadapan hukum harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*).

Apabila seorang yang mampu (*the have*) mempunyai masalah hukum, ia dapat menunjuk seorang atau lebih advokat untuk membela kepentingannya. Sebaliknya seorang yang tergolong tidak mampu (*the have not*) juga dapat meminta pembelaan dari seorang atau lebih pembela umum (*public defender*) sebagai pekerja di lembaga bantuan hukum (*legal aid institute*) untuk membela kepentingannya dalam suatu perkara hukum. Perolehan pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum (*access to legal counsel*) adalah hak asasi manusia setiap orang dan merupakan salah satu unsur untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang (*justice for all*), tidak adil bilamana orang yang mampu saja yang dibela oleh advokat dalam menghadapi masalah hukum, sedangkan fakir miskin tidak memperoleh pembelaan karena tidak sanggup membayar uang jasa (*fee*) seorang advokat.

Bantuan hukum yang diberikan pada tersangka atau terdakwa pada hakekatnya adalah membela peraturan hukum dan juga perlindungan yang diberikan agar tersangka atau terdakwa terlindungi haknya. Bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa bukanlah semata-mata membela kepentingan tersangka atau terdakwa untuk bebas dari segala tuntutan tetapi tujuan pembelaan dalam perkara pidana pada hakekatnya adalah untuk membela peraturan hukum jangan sampai peraturan

hukum tersebut salah atau tidak adil diterapkan dalam suatu perkara. Dengan demikian tujuan pembelaan dalam perkara pidana di setiap proses beracara mengandung makna sebagai pemberian bantuan hukum kepada aparat atau penegak hukum dalam membuat atau memutuskan suatu keputusan yang adil dan benar menurut peraturan hukum yang berlaku. Jadi tugas pembela bukan matimatian membela kesalahan tersangka atau terdakwa akan tetapi adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Pengabaian dan pelanggaran yang sering terjadi dalam praktek ketika tersangka ditangkap dan diinterogasi penyidik jarang sekali memberitahukan kepadanya hak Tersangka untuk mendapat bantuan hukum yang justru masih menggunakan cara dengan kekerasan fisik dan pshikis dalam meminta keterangan kepada tersangka dan mengabaikan hak tersangka tersebut, Alasannya jika menggunakan Penasehat hukum akan mempersulit jalannya pemeriksaan dan dalam persidangan hukumannya menjadi semakin berat, yang kemudian tersangka diperintah untuk menandatangani surat pernyataan penolakan didampingi oleh penasehat hukum. Hal ini sungguh ironis dan telah melanggar sebagaimana amanat dalam Pasal 114 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi "dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulai pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasehat hukum sebagaimana dimaksud pasal 56."

Bahwa urgensi pemberian bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa dengan ancaman hukum diatas lima tahun adalah sebagaimana tersirat dan tersurat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung antara lain :

---

<sup>2</sup> Riduan Syahrani, *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana* (Bandung: Alumni, 1983), 26.

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1565 K/Pid/1991 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Apabila syarat-syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasehat hukum dan didampingi penasehat hukum bagi tersangka sejak awal penyidikan, tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima".
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 367 K/Pid/1998 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "bila tak didampingi oleh penasehat hukum di tingkat penyidikan, maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHP, hingga berita acara pemeriksaan penyidikan dan penuntut umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan di dampingi penasehat hukum"

Putusan Mahkamah Agung tersebut memberikan peringatan kepada pejabat dalam semua tingkat penyidikan dalam memenuhi hak tersangka untuk mendapat bantuan hukum dalam mewujudkan persamaan perlakuan bagi setiap orang yang tersangkut ancaman pidana diatas lima tahun.

### **Teori Perlindungan Hukum**

Berbicara mengenai perlindungan hukum, hal tersebut merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum. Dianggap penting karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Dalam kaitan ini Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa:<sup>3</sup>

"Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula

---

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1983), 121.

bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum”.

Unsur “kepastian hukum” maksudnya setiap orang yang mengharapkan dapat diterapkan hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit: *fiat justitia et per eat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan), dengan adanya kepastian hukum maka akan tercipta ketertiban masyarakat. Selain itu unsur “kemanfaatan” maksudnya masyarakat juga mengharapkan manfaat dalam penegakan hukum, jangan sampai justru karena hukumnya ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat. Sedang unsur “keadilan”, maksudnya hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan.<sup>4</sup>

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.<sup>5</sup> Muchsin berpendapat bahwa Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>6</sup>

1. Perlindungan Hukum Preventif:

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

---

<sup>4</sup> Ismail Sunny, *Mekanisme Demokrasi Pancasila* (Jakarta: Aksara Baru, 1979), 140.

<sup>5</sup> Nafi' Mubarak, “Kebijakan Negara dalam Keterlambatan Pengurusan Akta Kelahiran Anak,” *Jurnal Al-Qa>nu>n* 19, no. 1 (Juni 2016): 48.

<sup>6</sup> Muchsin, “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia” (Tesis, Surakarta, Universitas Sebelas Maret, 2003), 14.

## 2. Perlindungan Hukum Represif:

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "Rule of The Law". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>7</sup>

Unsur-unsur negara hukum terdapat dalam konstitusi. Di Indonesia, unsur-unsur negara hukum terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditetapkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu unsur negara hukum. Salah satu ciri negara hukum adalah adanya perlindungan hukum bagi rakyat. Philipus M Hadjon menyatakan perlindungan hukum bagi rakyat oleh Pemerintah diarahkan kepada:<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 38.

<sup>8</sup> Hadjon, 90.

1. usaha-usaha untuk mencegah terjadinya sengketa atau sedapat mungkin mengurangi terjadinya sengketa; dalam hubungan ini sarana perlindungan hukum preventif patut diutamakan dari pada sarana perlindungan hukum yang represif;
2. usaha-usaha untuk menyelesaikan sengketa antara Pemerintah dan rakyat dengan cara musyawarah;
3. penyelesaian sengketa melalui peradilan merupakan jalan terakhir, peradilan hendaklah merupakan "*ultimum remedium*" dan peradilan bukan forum konfrontasi sehingga peradilan harus mencerminkan suasana damai dan tentram terutama melalui hukum acaranya.

### **Teori Equality Before the Law**

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan amanat konstitusi maka supremasi hukum harus ditegakkan. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia didasari oleh asas-asas hukum, salah satunya adalah asas *equality before the law*, tetapi berbagai macam permasalahan hukum sekarang ini mulai menggerogoti asas tersebut sehingga proses penegakan hukum mulai tak berjalan dengan baik. Adanya pembedaan perlakuan oleh lembaga Peradilan terhadap bentuk penahanan bagi pelaku tindak pidana, menjadi bukti asas *equality before the law* tak lagi menjadi pengawal sistem peradilan pidana dalam menegakan hukum hukum substantif. Orang-orang yang terlibat dalam kasus-kasus tersebut di duga merupakan orang-orang yang berada dalam lingkaran kekuasaan sehingga proses penegakan hukum menjadi belum berjalan dengan baik.

Asas *equality before the law* yang menjadi pengawal agar setiap warga negara ini dipandang sama di depan hukum harus benar-benar ditegakan, karena disamping asas *equality before the law* sebagai asas dalam sistem peradilan pidana Indonesia juga merupakan amanat konstitusi karena di pasal 27 ayat (1) Undang-undang



Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Hal tersebut menunjukkan bahwa konstitusi kita yang merupakan hukum dasar dan konsensus semua elemen bangsa menghendaki adanya persamaan di muka hukum tanpa terkecuali. Sehingga asas itu harus dijaga demi kedaulatan hukum umumnya dan sistem peradilan pidana khususnya.

Asas hukum *Equality before the law* berasal dari pengakuan terhadap *individual freedom* bertalian dengan hal tersebut telah diakui secara universal tanpa membedakan ras, gender, agama maupun status sosial terdapat istilah “*that all men are created equal*” terutama dalam kaitannya dengan hak-hak dasar manusia. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Artinya, semua orang diperlakukan sama di depan hukum.

Asas persamaan dihadapan hukum merupakan asas dimana terdapatnya suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada suatu pengecualian. Asas persamaan dihadapan hukum itu bisa dijadikan sebagai standar untuk mengafirmasi kelompok-kelompok marjinal atau kelompok minoritas. Namun disisi lain, karena ketimpangan sumber daya (kekuasaan, modal dan informasi) asas tersebut sering didominasi oleh penguasa dan pemodal sebagai tameng untuk melindungi aset dan kekuasaannya.

Konsep *Equality before the Law* telah dijamin dalam konstitusi sebagai suatu pengakuan tertinggi dalam sistem peraturan perundang-undangan di tanah air, prinsip ini berarti bahwa persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) adalah untuk perkara (tindak pidana) yang sama. Dalam kenyataan, tidak ada perlakuan yang sama

(*equal treatment*), dan itu menyebabkan hak-hak individu dalam memperoleh keadilan (*access to justice*) terabaikan. Perlakuan berbeda dalam tindak pidana korupsi menyebabkan pengabaian terhadap kebebasan individu. Ini berarti, kepastian hukum terabaikan. Dalam konsep *equality before the law*, hakim harus bertindak seimbang dalam memimpin sidang di pengadilan biasa disebut sebagai prinsip *audi et alteram partem*<sup>9</sup>

Prinsip persamaan kedudukan berarti menempatkan warga negara mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Sehingga dengan kedudukan yang setara, maka warga negara dalam berhadapan dengan hukum tidak ada yang berada diatas hukum. "*No man above the law*", artinya tidak keistimewaan yang diberikan oleh hukum pada subyek hukum. Tujuan utama adanya asas "*Equality before the law*" adalah menegakkan keadilan dimana persamaan kedudukan berarti hukum sebagai satu entitas tidak membedakan siapapun yang meminta keadilan kepadanya. Diharapkan dengan adanya asas ini tidak terjadi suatu diskriminasi dalam supremasi hukum di Indonesia dimana ada suatu pembeda antara penguasa dengan rakyatnya.

### **Landasan Filosofis dan Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berat.**

Landasan filosofis merupakan landasan yang bersifat ideal, memotivasi aparat penegak hukum untuk mengarahkan semangat dan dedikasi pengabdian dan penegakan hukum untuk mewujudkan keluhuran,

---

<sup>9</sup> Asas *Audi et Alteram Partem* dikenal sebagai azas keseimbangan dalam hukum acara pidana, yakni seorang hakim wajib untuk mendengarkan pembelaan dari pihak yang disangka atau didakwa melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum guna menemukan kebenaran materiil suatu perkara yang diadilinya. Hak untuk didengar pendapatnya sebagai perwujudan asas *audi et alteram partem* ini juga adalah merupakan hak yang dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945.

kebenaran dan keadilan. Dengan demikian setiap tindakan penegak hukum harus sejajar dengan cita-cita yang terkandung dengan semangat dan keluhuran tujuan yang filosofis dimaksud.<sup>10</sup>

Bahwa Landasan Filosofis pemberian bantuan hukum terhadap pelaku tidak pidana berat adalah berdasar Pancasila, yaitu Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Dengan Sila Ketuhanan Yang dan Sila Kemanusiaan, mengakui bahwa setiap aparat penegak hukum maupun tersangka/terdakwa yang diduga sebagai pelaku tindak pidana berat adalah:<sup>11</sup>

1. Sama-sama manusia yang dependen kepada Tuhan yang tergantung kepada kehendak Tuhan, semua makhluk tanpa terkecuali adalah ciptaan Tuhan, yang kelahirannya dipermukaan bumi semata-mata atas kehendak dan berkat rahmat Tuhan;
2. Oleh karena semua manusia merupakan hasil ciptaan Tuhan dan tergantung kepada kehendak Tuhan, hal ini mengandung makna bahwa :
  - a. Tidak ada perbedaan asasi sesama manusia termasuk pelaku tindak pidana berat;
  - b. Sama-sama mempunyai tugas sesama manusia untuk mengembangkan dan mempertahankan kodrat, harkat dan martabatnya sebagai manusia ciptaan Tuhan;
  - c. Setiap Manusia mempunyai hak kemanusiaan yang harus dilindungi tanpa terkecuali.

Berdasarkan jiwa yang terkandung dalam Sila Ketuhanan sebagaimana tersebut, pemberian bantuan hukum oleh Advokat terhadap pelaku tindak pidana berat tiada lain sebagai fungsi pengabdian melaksanakan amanat Tuhan, yaitu dengan cara menempatkan setiap manusia

---

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Edisi Kedua)* (Jakarta: Sinar Grafika, 1985), 20.

<sup>11</sup> Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Bandung: Mandar Maju, 2009), 73.

dalam posisinya sebagai tersangka/terdakwa pelaku tindak pidana berat:

1. Manusia hamba tuhan yang memiliki hak dan martabat kemanusiaan yang harus dilindungi;
2. Sebagai manusia yang mempunyai hak dan kedudukan untuk mempertahankan hak dan martabatnya.

Selanjutnya yang dapat dijadikan sebagai landasan filosofis dalam pemberian bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana berat adalah sebagaimana pengakuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan secara tegas Indonesia adalah Negara hukum, Prinsip Negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*Equality before the law*). Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar 1945 juga menentukan bahwa setiap orang termasuk pelaku tindak pidana berat berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang termasuk pelaku tindak pidana berat berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip Negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab dalam memberikan bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana berat merupakan hal yang penting.<sup>12</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam pembukaan alinea pertama menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, maksud dan tujuan dari pernyataan

---

<sup>12</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

tersebut ini adalah manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang pada hakekatnya memiliki harkat dan martabat yang sama dan tidak dapat dicabut oleh siapapun, dengan demikian segala hal yang menyangkut perlindungan harkat dan martabat diatur lebih lanjut seperti diamanatkan dalam Pasal 28 huruf D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yaitu “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

### **Konsekuensi Yuridis bagi Penyidik yang Tidak Memberitahukan Hak Tersangka untuk Mendapat Bantuan Hukum Cuma-Cuma**

Bahwa dalam Pasal 114 Kitab undang-undang hukum acara pidana untuk selanjutnya disingkat KUHAP merupakan kewajiban penyidik untuk menyampaikan hak tersangka terkait bantuan hukum yang tertuang dalam Pasal 56 KUHAP. Sejauh ini belum ada suatu peraturan perundang-undangan yang memuat akibat hukum apabila ketentuan Pasal 114 Kitab undang-undang hukum acara pidana tidak dilaksanakan oleh penyidik. Selain itu juga belum adanya sanksi bagi penyidik yang lalai melaksanakan kewajibannya yang ada dalam Pasal 114 Kitab undang-undang hukum acara pidana. Sedangkan akibat hukum apabila ketentuan Pasal 56 KUHAP tidak dilaksanakan adalah berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik dianggap batal demi hukum. Mengenai Sanksi bagi aparat penegak hukum yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 56 Kitab undang-undang hukum acara pidana sejauh ini belum ada peraturan yang mengaturnya.

Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 1565 K/Pid/1991, tertanggal 16 September 1993 menyebutkan dalam putusannya yang didasarkan atas pertimbangan karena tidak ditunjuknya penasihat hukum untuk mendampingi tersangka pada pemeriksaanditingkat penyidikan dan ditingkat penuntutan, maka hal itu

bertentangan dengan Pasal 56 KUHP, sehingga mengakibatkan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik dinyatakan batal demi hukum dan oleh karena itu penuntutan yang dibuat oleh Penuntut Umum juga batal demi hukum sehingga tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa di dampingi penasihat hukum.

Apabila ketentuan Pasal 56 KUHP tidak dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, maka terdakwa dapat mengungkapkan melalui Eksepsi, Pledoi, Banding, dan Kasasi. Pengajuan Upaya Hukum terkait pelanggaran Pasal 56 KUHP tersebut hanya dapat diajukan apabila terjadi pelanggaran Pasal 56 KUHP ditingkat penangkapan, penahanan dan persidangan, keputusan diterima atau tidaknya pengajuan tersebut tergantung kebijakan hakim. Selain upaya praperadilan, tersangka dapat pula mengadukan petugas polisi yang sewenang-wenang pada saat penangkapan dan penahanan kepada Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri karena telah terjadi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang terutama diatur dalam Pasal 15 Perkapolri No.14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selain upaya praperadilan, tersangka dapat pula mengadukan petugas polisi (penyidik) yang sewenang-wenang pada saat penangkapan dan penahanan kepada Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri karena telah terjadi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang terutama diatur dalam Pasal 15 Perkapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bahwa alangkah baiknya apabila terjadi pelanggaran pada tahap pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dapat pula diadukan ke Divpropam sebagai pelanggaran kode etik agar penyalahgunaan wewenang yang sering dilakukan oleh penyidik pada tahap pemeriksaan terhadap tersangka, seperti: penganiayaan dan memaksa tersangka

mengaku, dapat diminimalisir. Jika pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik pada proses pemeriksaan terhadap tersangka dapat dikategorikan kedalam pelanggaran kode etik. Seperti yang disampaikan diatas bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1565/K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993 dalam pertimbangannya menyebutkan apabila “syarat-syarat penyidikan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasehat hukum bagi tersangka sejak awal penyidik, tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima”. Selain akibat hukum terkait tidak dipenuhinya hak tersangka dalam mendapat bantuan hukum yang ada dalam putusan tersebut, dalam Surat Keputusan Kapolri No Pol:kep/1205/IX/2000 Tentang Revisi Himpunan JUTLAK dan JUKNIS proses Penyidikan Tindak Pidana yang ditetapkan di Jakarta tanggal 11 September 2000 dan berdasarkan Pasal 143 ayat 3 KUHP juga disebutkan apabila berita acara pemeriksaan tidak memenuhi syarat materiil maka berita acara pemeriksaan akan cacat hukum, yang juga akan menjadikan Dakwaan Batal Demi Hukum. Sedangkan jika berita acara pemeriksaan tidak memenuhi ketentuan formil, maka tidak akan berakibat hukum apapun.

Bahwa menyampaikan hak-hak tersangka merupakan salah satu syarat materiil dalam penyusunan berita acara pemeriksaan. Jadi apabila penyidik tidak menyampaikan hak-hak tersangka termasuk hak mendapat bantuan hukum, maka menurut penulis bahwa berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik tersebut dapat dibatalkan demi hukum demikian juga dengan surat dakwaannya. Jadi tidak hanya pelanggaran pada Pasal 56 KUHP saja yang dapat membatalkan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik namun sudah seharusnya pelanggaran Pasal 114 KUHP juga dapat membatalkan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik.

Para pejabat penegak hukum yang menurut hukum mempunyai suatu kewajiban untuk memberitahukan serta

menjelaskan hak-hak tersangka sebelum menjalani proses hukum acara pidana, seringkali mereka cenderung menghindari kewajibannya tersebut. Cara mereka menghindari kewajibannya tersebut yakni dengan tidak memberitahukan sama sekali atau membodohi tersangka atau terdakwa, memberitahukan namun disertai dengan ancaman (menakut-nakuti) dengan cara yang tidak simpatik, memberitahukan namun disertai dengan keterangan yang berkesan halus namun tidak jelas.<sup>13</sup>

Hukum memberi wewenang kepada polisi untuk menegakkan hukum dengan berbagai cara, baik secara preventif maupun represif yang berupa pemaksaan dan penindakan. Dalam proses penyidikan polisi cenderung represif, kecenderungan ini menyebabkan tugas polisi lekat dengan penggunaan kekerasan sebagai salah satu cara untuk mengatasi hambatan dalam penyidikan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan tersangka mengenai suatu tindak pidana.<sup>14</sup>

Untuk melindungi tersangka dari tindakan penyidik yang sewenang-wenang maka dalam KUHAP diatur mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia khususnya terkait dengan hak tersangka dan terdakwa yang diatur dalam Bab VI (Pasal 50 sampai dengan Pasal 68) KUHAP. Meskipun hak-hak tersangka sudah diatur dengan jelas dalam KUHAP namun dalam praktiknya seringkali terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersangka yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terkait.

Bagi tersangka yang awam hukum akan kesulitan untuk meminta maupun menuntut hak-hak yang dimilikinya oleh karena itu penyidik berkewajiban memberitahukan secara rinci mengenai hak-hak yang dimiliki oleh tersangka khususnya memberitahukan hak tersangka dalam memperoleh bantuan hukum. Dalam

---

<sup>13</sup> Al. Wisnubroto, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), 52.

<sup>14</sup> Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 69.



KUHAP sudah diatur mengenai kewajiban penyidik untuk memberitahukan hak-hak yang dimiliki tersangka namun ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penyidik tersebut seringkali dilanggar khususnya kewajiban penyidik memberitahukan hak tersangka dalam mendapat bantuan hukum (Pasal 114 KUHAP).

## Penutup

Dari berbagai pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Konstitusi menjamin hak setiap warga negara mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum, termasuk hak untuk mengakses keadilan melalui pemberian bantuan hukum. Meskipun demikian peradilan yang sangat birokratis, mahal, rumit (prosedural), sifatnya yang *isoterik* (hanya dapat dipahami kalangan orang hukum), menyebabkan tidak semua orang mendapatkan akses dan perlakuan yang sama pada saat berurusan dengan hukum, terutama bagi masyarakat miskin. Orang kaya dan mempunyai kekuasaan, dengan mudah mengakses dan mendapatkan “keadilan”, melalui tangan-tangan *lawyer* (Advokat) yang disewanya. Tidak demikian halnya kelompok masyarakat miskin, mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memahami hukum dan tidak mampu untuk membayar Advokat, hal demikian menyebabkan tidak ada perlakuan dan perlindungan yang sama dimuka hukum dalam mengakses keadilan. Problem dasar yang muncul adalah tidak adanya perluasan akses yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama dimuka hukum, demi terciptanya keadilan, maka hukum harus dapat diakses oleh semua warga negara tanpa terkecuali (*justice for all/accessible to all*).
2. Beberapa bentuk jaminan hukum terhadap pelaku tindak pidana berat yang memperoleh bantuan hukum

antara lain dengan didampingi oleh penasihat hukum yang disediakan oleh negara melalui lembaga lembaga penyedia bantuan hukum yang telah terdaftar di kementerian hukum dan hak asasi manusia republik Indonesia adalah dapat menggunakan hak-haknya yang acapkali terabaikan dan tidak diketahui oleh mereka yang awam hukum sebelum adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap antara lain: Hak untuk mendapatkan pemeriksaan segera di setiap tingkatan:

- a. Hak bahasa;
  - b. Hak memberikan keterangan secara bebas;
  - c. Hak bantuan hokum;
  - d. Hak komunikasi dengan penasehat hukum;
  - e. Hak kesehatan;
  - f. Hak pemberitahuan atas penahanan;
  - g. Hak menerima kunjungan;
  - h. Hak korespondensi;
  - i. Hak keagamaan;
  - j. Hak diadili secara terbuka;
  - k. Hak mengajukan saksi *a-de charge*;
  - l. Hak upaya hukum;
  - m. Hak ganti kerugian dan rehabilitasi.
3. Bahwa Yurisprudensi atau putusan pengadilan merupakan produk yudikatif, yang berisi kaedah atau peraturan hukum yang mengikat pihak-pihak bersangkutan atau terhukum.<sup>15</sup> Telah banyak contoh kasus yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menjadi yurisprudensi yang memuat tentang tidak sahnya berita acara pemeriksaan apabila hak tersangka khususnya hak terkait dengan bantuan hukum tidak disampaikan/dipenuhi oleh penyidik.

Sebagai rekomendasi dari tulisan ini, maka diajukan saransebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2003), 112.

1. Advokat yang telah melaksanakan tugas pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu agar diberikan imbalan/honorarium secara adil dan layak yang dijamin oleh negara yang dianggarkan/dibebankan melalui APBN/APBD dan yang besarnya disesuaikan pula dengan peraturan yang berlaku serta kemampuan keuangan negara/daerah (pemerintah provinsi/kabupaten/kota) yang bersangkutan.
2. Bahwa Perlu diberlakukannya suatu peraturan perundang- undangan yang memuat sanksi khusus bagi penyidik yang tidak melaksanakan kewajibannya yaitu memberitahukan hak tersangka dalam mendapat bantuan hukum (Pasal 114 KUHAP) karena apabila ketentuan yang ada dalam Pasal 114 KUHAP tidak dilaksanakan oleh penyidik maka tersangka yang awam hukum tidak akan mengetahui bahwa ia memiliki hak mendapat bantuan hukum (Pasal 56 KUHAP) kecuali penyidik dengan kesadarannya sendiri tanpa memberitahukan hak tersangka, sudah menyediakan bantuan hukum

### Daftar Pustaka

- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika, 1985.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Mubarok, Nafi'. "Kebijakan Negara dalam Keterlambatan Pengurusan Akta Kelahiran Anak." *Jurnal Al-Qa>nu>n* 19, no. 1 (Juni 2016).
- Muchsin. "Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia." Tesis, Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Rahardjo, Satjipto. *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1983.
- Simanjuntak, Nikolas. *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

- Sunggono, Bambang, dan Aries Harianto. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Sunny, Ismail. *Mekanisme Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Aksara Baru, 1979.
- Syahrani, Riduan. *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Alumni, 1983.
- Wisnubroto, Al. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.